



**Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Dramaga Kabupaten
Bogor**

INFO PENULIS

Hanifa Salmah
Universitas Jenderal Soedirman
hanifa.salmah@mhs.unsoed.ac.id

Tyas Retno Wulan
Universitas Jenderal Soedirman
tyas.wulan@unsoed.ac.id

Rin Rostikawati
Universitas Jenderal Soedirman
rin.rostikawati@unsoed.ac.id

Masrukin
Universitas Jenderal Soedirman
masrukin@unsoed.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Salmah, H., Wulan, T. R., Rostikawati, R., Marukin (2025) Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2485-2494.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan analisis sosiologi dalam mengkaji peran pendamping PKH. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH tidak hanya memberikan informasi tentang pencairan dana dan melakukan P2K2, tetapi turut mengatasi permasalahan para pemerlu atensi sosial. Kendala yang dihadapi adalah berupa permasalahan terkait pencairan dana dan sulitnya memberikan kesadaran kepada KPM untuk melakukan graduasi mandiri karena sulitnya mengubah pola pikir KPM dengan keterbatasan SDM Pendamping PKH dan kurang tegasnya aturan yang berlaku terkait dengan ketentuan graduasi KPM PKH.

Kata Kunci: PKH, Pemberdayaan, P2K2

Abstract

This study aims to determine the role of PKH facilitators in community empowerment through P2K2 in Dramaga Subdistrict, Bogor Regency, and to identify the obstacles

faced by PKH facilitators in implementing P2K2 in Dramaga Subdistrict, Bogor Regency. The novelty of this study lies in its use of sociological analysis to examine the role of PKH facilitators. The study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-dept interviews, observations, and documentation. The results indicate that the role of PKH facilitators extends beyond providing information on fund disbursement and conducting P2K2 activities; they also address the challenges faced by socially vulnerable individuals. The obstacles faced are related to fund disbursement and the difficulty of raising awareness among KPM to graduate independently due to the difficulty of changing the mindset of KPM with limited PKH facilitator human resources and the lack of strict rules regarding PKH KPM graduation requirements.

Key Words: PKH, Empowerment, P2K2

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup masyarakat di suatu daerah, kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok baik pangan, sandang maupun papan. Rendahnya kemampuan pendapatan juga berdampak pada kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan pendidikan (Rahman et al., 2019). Saat ini konsep kemiskinan tidak hanya meliputi masalah ekonomi dan keuangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi mencakup aspek sosial yakni kemampuan dalam mengakses pelayanan hidup dasar yang memadai (Sulkarnain et al., 2021). Hal ini berarti kemiskinan juga mencakup ketidakmampuan seseorang dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang lainnya. Kemiskinan membuat seseorang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadikan penghambat dalam memperoleh kesejahteraan. Maka dari itu suatu penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara efektif dan komprehensif oleh pihak pemerintah maupun masyarakat agar bisa menciptakan suatu kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Maka dari itu keluarga memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kamilah et al., 2023).

Pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini melalui program-program pengentasan kemiskinan. Berbagai macam program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini salah satu program yang masih dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH ini adalah berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan sosial yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH/KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Program ini masuk ke dalam model *social transfer* yang berbentuk tunai dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT). Program yang diluncurkan oleh Kemensos ini tentunya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kemensos, 2023). Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007 dengan jumlah penerima manfaat yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sesuai amanah UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin untuk menggunakan satu data terpadu, program penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk PKH menggunakan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kusumaningrum et al., 2020). PKH memberikan dampak yang sangat baik dalam membantu perekonomian masyarakat karena PKH tidak hanya memberikan bantuan tetapi melakukan pendampingan oleh pendamping sosial PKH untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang berbagai macam bantuan sosial dari segala manfaat dan syaratnya (Julfani & Putra, 2023).

Program Keluarga Harapan yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak terbatas pada bantuan tunai, tetapi turut melaksanakan pemberdayaan kepada para keluarga penerima manfaat yakni kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Secara harafiah pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan membuat berdaya, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Hakikat pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian masyarakat (Depari et al., 2023). Pemberdayaan keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat perlu dilakukan untuk mengoptimalkan

kemampuan keluarga dan memberikan kemampuan efektif untuk keluarga tersebut bisa mempertahankan kesejahteraan kehidupan (Nadilla et al., 2022).

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan, kegiatan pertemuan ini di dalamnya memuat proses pembelajaran terstruktur untuk melakukan perubahan perilaku keluarga penerima manfaat dan untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak (Fatimah et al., 2019). Dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), penyampaian terkait dengan pemahaman materi dilakukan oleh pendamping sosial PKH dengan modul yang harus disiapkan meliputi Modul Pengasuhan Anak dan Pendidikan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan dan Usaha, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Perlindungan Anak, Modul Kesejahteraan Sosial disabilitas dan lansia (Nurchotimah et al., 2020). Pelaksanaan P2K2 menurut pedoman adalah penyampaian materi selama 120 menit dan waktu pelaksanaan dapat ditentukan antara KPM PKH dan pendamping (Pribowo & Pratiwi, 2023).

Keluarga penerima manfaat PKH umumnya memiliki pendidikan yang rendah sehingga mereka kesulitan untuk bisa mengembangkan diri bahkan mengakses layanan publik. Permasalahan yang dihadapi oleh KPM PKH di lapangan tidak terbatas pada masalah kurangnya pemahaman terkait dengan perbaikan pola perilaku yang diberikan lewat modul, tetapi permasalahan terkait dengan kurangnya pengetahuan KPM PKH terkait dengan cara mencairkan dana bantuan sosial, kurangnya pengetahuan tentang nominal/besaran uang yang diterima, suasana tidak kondusif saat pencairan dana, dan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH juga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pendamping sosial PKH melalui P2K2. Pada dasarnya pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator untuk mendorong dan memotivasi masyarakat, sebagai fasilitator pendamping dapat membantu masyarakat yang didampingi dalam memenuhi semua kewajiban dalam kegiatan sosial yang dilakukan (Nandini et al., 2022). Peran pendamping PKH juga tentunya adalah sebagai fasilitator/penyuluh yang dalam hal ini tidak hanya bertugas untuk memberikan edukasi saja tetapi mencoba membantu masyarakat dalam mendampingi proses pencairan dana dan menyampaikan informasi terkait dengan PKH dan membuka ruang dan waktu bagi KPM PKH untuk menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan PKH (Susridawati & Ali, 2023).

Berkaitan dengan kebaruan penelitian, penulis menelaah beberapa penelitian dengan topik yang serupa sebagai pembanding dengan penelitian ini dan melakukan mini observasi terkait permasalahan yang ada. Penelitian sebelumnya telah dilaksanakan oleh Nurjanah et al (2022) tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia, yang menegaskan tentang peran pendamping PKH sebagai fasilitator dan mediator yang mengarahkan, mendorong, memotivasi, dan mengajak KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan serta hak dan kewajiban selaku KPM PKH. Selain itu juga dibahas tentang implementasi program melalui penyusunan perencanaan tentang pelaksanaan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) sebagai strategi pemberdayaan. Penelitian lainnya oleh Wijaya (2019) tentang Gerakan Literasi Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera. Penelitian ini menekankan pada peningkatan kemampuan keluarga sebagai gerakan literasi yang mengedukasi warga masyarakat menggunakan modul-modul tertentu yang disesuaikan dengan KPM dan kemudian disampaikan oleh pendamping agar dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keahlian para penerima manfaat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang serupa dan kompleks terkait dengan pelaksanaan PKH terutama pada proses P2K2 sebagai sarana pemberdayaan dikarenakan adanya kesenjangan rasio antara jumlah pendamping dan jumlah KPM di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor yaitu jumlah pendamping yang hanya 7 orang perlu mendampingi sebanyak 3113 KPM. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap sebuah permasalahan atau fenomena secara lebih mendalam dan menyeluruh. Penelitian deskriptif menjadi suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena alamiah

maupun fenomena buatan manusia. Pada dasarnya pendekatan ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu fenomena dengan menampilkan data sesuai dengan kejadian riil di lapangan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pendamping PKH dalam pemberdayaan masyarakat melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan Kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* sebagai penentu subjek penelitian.

Penentuan subjek penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan sengaja menentukan informan yang bisa memberi informasi penting yakni pihak-pihak yang sesuai dengan topik penelitian sehingga informasi yang didapat lebih akurat karena dikumpulkan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Pendamping PKH, Koordinator Pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Subjek utama dari penelitian ini adalah pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, sedangkan subjek pendukung adalah Keluarga Penerima Manfaat dan Koordinator PKH Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) kepada subjek penelitian, observasi saat wawancara dan mengikuti P2K2, dan dokumentasi dengan menggunakan kajian pustaka dan foto yang diambil langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian. Metode analisis data menggunakan Analisis Interaktif dari Milles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan keabsahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada subyek informan yang meliputi pendamping PKH, KPM PKH, dan Koordinator PKH tingkat Kecamatan di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei 2025 dengan melakukan wawancara kepada Bapak Andri, Ibu Nani dan Ibu Isma, selaku pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Ibu Aliya dan Ibu Dena selaku KPM PKH Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, serta Ibu Erna selaku pendamping PKH sekaligus Koordinator PKH Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan subyek informan, lalu melakukan observasi berupa turut mengikuti P2K2 di beberapa desa yakni Desa Ciherang, Desa Sukawening, dan Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, serta melakukan dokumentasi dari kajian pustaka dan pengambilan foto saat melakukan proses observasi. Rangkaian penelitian ini kemudian dikaji sehingga mendapatkan hasil yang menjawab pertanyaan dari penelitian yakni terkait dengan pendamping PKH dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan PKH.

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam keberlangsungan Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada sejumlah 7 pendamping yang mendampingi 3113 KPM di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. Adanya rasio antara jumlah pendamping dengan jumlah KPM menjadikan pelaksanaan PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor mempunyai kendala yang cukup kompleks karena kekurangan SDM yang mana pendamping PKH perlu mengurus KPM di luar batas ideal jumlah pendampingan. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Ibu Erna selaku pendamping PKH sekaligus Koordinator dan pendamping lainnya di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

“Masih banyak kendala, yang pertama itu kita kurang SDMnya, termasuk kurang lah, kita masih ada satu pendamping yang megang 500 KPM, ada yang 400 KPM, tapi idealnya itu sekarang 350, kalau dulu kan 200 an. Nah kita satu kecamatan ada 10 desa, kita cuma ada 7 pendamping dengan jumlah total akumulasi semua satu kecamatan itu 3113 KPM.” (Erna, Mei 2025)

“Kendalanya malah kebanyakan aduan masalah setelah pencairan. Seperti ada bantuan yang berkurang, ada yang bantuannya lebih besar. Kemudian kartu dipegang oleh pihak-pihak tertentu.” (Andri, Mei 2025)

“Masih ada KPM sejak 2007. Namun masih mau diarahkan untuk melakukan graduasi mandiri.” (Nani, Mei 2025)

Adapun pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor yang hanya berjumlah 7 orang ini mempunyai beberapa peran dalam rangka mensukseskan proses pelaksanaan PKH.

Sesuai dengan salah satu sasaran PKH yang menargetkan komponen pendidikan untuk diberikan bantuan, pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor berperan dalam memastikan anak KPM sekolah dengan baik dengan cara melakukan verifikasi dengan fasilitas pendidikan yakni sekolah. Untuk komponen kesehatan yang menargetkan ibu hamil, pendamping PKH berperan dalam melakukan verifikasi ke fasilitas kesehatan dan memantau langsung ke posyandu, serta melakukan koordinasi ke bidan desa. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Erna selaku pendamping dan Koordinator Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dan para pendamping lainnya.

“Kita ada verifikasi ke faskes sama fasdik, tapi buat fasdik sudah *by system*, jadi kita mantau dari SIKS-NG saja, anak itu masih aktif dapodiknya apa nggak, nah kita sinkron saja kalau yang pendidikan. Tapi kalau yang kesehatan kita ke posyandu sih, lebih koordinasi ke bidan desanya.” (Erna, Mei 2025)

“Pendamping memastikan anaknya sekolah, kemudian kita cek ke rumahnya apakah ada yang diperlukan. Kesehatan misalnya ada yang tidak paham BPJS, maka kita arahkan ke kadernya. Harusnya kalau kesehatan juga itu kita bareng bidan dengan dinas kesehatan. Tapi paling saya cek posyandu lansia dan melakukan *home visite*.” (Isma, Mei 2025)

Komponen terakhir dari sasaran PKH adalah komponen kesejahteraan sosial yakni mencakup lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat. Dalam hal ini pendamping PKH berperan dalam melakukan *home visite* untuk memeriksa kondisi lansia dan memastikan mereka mendapatkan bantuannya. Untuk komponen disabilitas, pendamping PKH juga melakukan *home visite* untuk memeriksa kondisi juga melakukan koordinasi dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) untuk memenuhi kebutuhan para disabilitas. Dalam hal ini biasanya pendamping PKH berperan dalam membantu mengajukan kebutuhan seperti bantuan pemberian kursi roda baik untuk lansia maupun orang disabilitas.

Tidak terbatas pada pendampingan terhadap 3 komponen penerima PKH, peran pendamping PKH cukup kompleks karena bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendampingan kepada 12 Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS) yang menjadi sasaran kerja Kemensos. Adapun 12 PAS ini meliputi anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Nafza dan HIV/AIDS, Difabel masalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin. Hal ini disampaikan oleh Ibu Isma selaku pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

“Kita kerja sama dengan IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Ketika kita turun lapangan kalau ada pemerlu kebutuhan sosial, kita saling koordinasi. Seperti ada yang butuh kursi roda. Pekerjaan kita apa saja di lapangan, seperti ada orang yang tidak diurus oleh anak dan istri dan tidak mandi-mandi. Pokoknya pemerlu kebutuhan sosial, ada 12 pos, pemerlu atensi sosial kementerian yang baru. Miskin, yatim piatu, disabilitas, bencana. Nah itu kalau ada bencana alam segala macam kita juga turun.” (Isma, Mei 2025)

Meninjau dari hal ini, peran pendamping PKH tidak hanya mengurus tentang proses PKH dan pendampingan kepada KPM PKH, tetapi juga turut serta melakukan pendampingan sebagai pekerja sosial yang bekerja sama dengan IPSM atau Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dengan turut mengurus pemerlu atensi sosial seperti mengurus ODGJ, mengurus anak yatim piatu, turut serta terjun ketika ada bencana alam, melakukan koordinasi untuk memberikan fasilitas kepada difabel, dll.

Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya juga berperan dalam melakukan survei perkembangan KPM PKH, terutama KPM yang akan melakukan graduasi mandiri. Hal ini disampaikan oleh KPM PKH yang akan melakukan graduasi mandiri yaitu Ibu Aliya dan Ibu Dena.

“Pendamping suka ke rumah, mantau perkembangan dan ngeliat keadaan, kayak kemaren ngasih tahu kalau saya sudah lumayan dan bisa lepas dari PKH.” (Dena, Mei 2025)

“Pendamping sering ke rumah buat ngecek perkembangan usaha saya. Biasanya sebulan sekali. Atau kalau ada apa-apa suka Whatsapp.” (Aliya, Mei 2025)

Saat ini pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sedang disibukkan untuk melakukan *Ground Checking* atau pemeriksaan lapangan dengan melakukan survei mengenai keadaan atau kondisi dari nama calon penerima bansos karena adanya pembaruan data dari DTKS ke DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Adanya pembaruan data ke DTSEN ini memudahkan pendamping PKH dalam melakukan survei dan *follow up* agar tidak

ada penerima bansos yang mendapat bansos lebih dari yang seharusnya. Singkatnya, DTSEN memudahkan pendamping PKH untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andri selaku pendamping PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

“Penyempurnaan dari DTKS, karena itu nanti dijadikan acuan data tunggal sebagai penerima bansos apapun juga, dari kementerian mana pun juga. Tadinya setiap kementerian kan punya data masing-masing, kayak kemensos punya DTKS. Cuma nanti melalui DTSEN dijadikan data tunggal untuk semua bantuan yang bersifat nasional itu. Biar tidak satu orang mendapatkan berbagai bantuan, makanya digunakan DTSEN itu.” (Andri, Mei 2025)

Peran pendamping PKH lainnya terletak pada proses pendampingan yang merupakan salah satu proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2. Pendamping PKH dalam melaksanakan P2K2 berperan sebagai pemberi daya dalam memberikan pengetahuan kepada KPM PKH melalui penyampaian materi yang sudah ditetapkan dalam modul P2K2. Penyampaian materi biasanya menggunakan metode ceramah dengan pendamping PKH yang menyampaikan materi lewat lisan dengan dibantu oleh buku ajar dengan tujuan menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh KPM. Umumnya metode penyampaian materi P2K2 tidak hanya lewat ceramah saja, tetapi menggunakan bahan bantu ajar lainnya seperti banner yang berisi materi modul P2K2, buku pintar, *flipchart*, bahkan menggunakan infokus untuk menampilkan video agar beberapa praktik dari materi bisa dilakukan.

Pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor masih berjalan namun kurang maksimal karena adanya rasio jumlah pendamping dan jumlah KPM yang cukup senjang. Pelaksanaan P2K2 yang seharusnya minimal dilaksanakan satu bulan sekali untuk setiap kelompok menjadi tidak maksimal dikarenakan banyaknya KPM yang harus dijangkau sehingga P2K2 dilaksanakan untuk beberapa kelompok. Adanya kendala ini juga berakibat pada pemberian materi yang tidak urut dan tuntas kepada seluruh KPM. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Erna selaku pendamping PKH sekaligus Koordinator Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

“P2K2 rutin, cuma gak maksimal. Yang seharusnya setiap kelompok itu setiap bulan, ini nggak bisa setiap bulan, otomatis bakal loncat-loncat, nggak bisa setiap satu kelompok itu diisi sesi satu, modul pengasuhan anak, nah bulan depan kan harusnya sesi ke 2, tapi gabisa karena kita harus megang kelompok yang lainnya lagi, karena masih banyak kelompok yang belum kesentuh, otomatis kita bergilir. Kadang 2-3 kelompok disatukan misal memungkinkan tempatnya, tapi kan kita di sini tahu sendiri kan rumahnya berhimpitan, kalau mengumpulkan terlalu banyak orang agak sulit, yang ada pertemuannya gak kondusif, gak efektif juga, karena kan juga berdesakan.” (Erna, Mei 2025)

Meninjau dari uraian di atas, peran pendamping PKH sebagai pekerja sosial yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pemerlu atensi sosial memang cukup kompleks dan perlu menyesuaikan dengan kondisi KPM dan keadaan di lapangan. Jumlah pendamping yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah KPM juga memunculkan kendala yang menjadi tantangan untuk evaluasi proses pelaksanaan PKH agar menjadi lebih baik.

Pembahasan

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang menjangkau keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang kemudian ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). PKH sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan Utama dari PKH adalah meningkatkan kualitas hidup melalui layanan esensial, meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, melakukan intervensi perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat, serta mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antar kelompok pendapatan melalui bantuan finansial dan non finansial (Ariwibowo & Sutiaputri, 2019). Adapun bantuan finansial PKH adalah berupa tunai dan bantuan non finansial berupa pendampingan oleh pendamping PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

P2K2 atau dalam istilah bahasa inggris adalah Family Development Session (FDS) merupakan proses belajar terstruktur untuk melakukan perubahan perilaku KPM PKH ke arah yang lebih baik. Adapun P2K2 menjadi ajang pemberdayaan KPM PKH untuk memberikan motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan melalui modul pembelajaran yang

disampaikan, sekaligus melakukan mobilitas sumber daya dan peningkatan kapasitas diri dengan materi yang disampaikan. Konsep P2K2 ini selaras dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada upaya untuk memberikan daya atau kekuatan pada kelompok yang lemah dengan membekali mereka dengan kemampuan dan sumber daya agar mereka mempunyai kendali atas hidupnya, sehingga tidak terbatas bantuan pangan, sandang, dan papan, tetapi membantu dalam akses pendidikan, kesehatan, dan melakukan perubahan pola perilaku (Hamid, 2018).

PKH dalam melakukan pemberdayaan ini didukung dengan adanya pendamping PKH sebagai pelaku pemberdaya dengan memberikan daya kepada sasaran pemberdayaan yaitu KPM PKH dengan membekali mereka pengetahuan melalui modul yang disampaikan. Adapun modul tersebut meliputi Modul Pengasuhan Anak dan Pendidikan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan dan Usaha, Modul Kesehatan dan Gizi, Modul Perlindungan Anak, Modul Kesejahteraan Sosial disabilitas dan lansia, dan Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting yang diberikan dengan metode ceramah oleh pendamping PKH dengan menggunakan bahan ajar berupa buku pintar, *flipchart*, poster, dan brosur. Penyampaian materi berlangsung selama 120 menit dan dilaksanakan minimal satu bulan sekali untuk setiap kelompok. Dalam proses pelaksanaannya tidak hanya pemberian materi, melainkan pemberian motivasi melalui pendekatan untuk memberikan kesadaran agar KPM PKH bisa melakukan intervensi perubahan pola perilaku dan tidak bergantung pada bantuan. Proses pemberdayaan tidak hanya dilakukan dalam P2K2, tetapi PKH turut memberikan pemberdayaan kepada KPM yang memiliki usia produktif untuk mau diberikan pemberdayaan berupa permodalan usaha berupa barang yang bisa digunakan untuk usaha. Adapun pemberdayaan melalui pemberian modal usaha ini sudah terlaksana dengan memberikan KPM PKH berupa gerobak dan seperangkat alat untuk berwirausaha.

Pendamping PKH merupakan pelaku pemberdaya yang berperan untuk menyesuaikan diri dalam proses pemberdayaan dan kepada sasaran pemberdayaan. Adapun proses penyesuaian diri ini diaktualisasikan melalui interaksi antar individu. Konsep interaksi simbolik oleh Mead menjadi linear dalam membahas peran pendamping PKH dalam proses pemberdayaan melalui P2K2. Mead dalam Poloma (2010) mengembangkan teori interaksi simbolik untuk membahas konsep peran yang dibentuk dan diubah oleh interaksi manusia dibanding ditentukan oleh struktur. George Herbert Mead dalam Prihandayani & Yulianti (2024) memberikan gagasan konsep interaksi simbolik yang memberikan gambaran tentang proses komunikasi antar individu yang melibatkan simbol-simbol sebagai alat pertukaran pesan baik secara verbal dan nonverbal. Simbol-simbol bisa berupa bahasa, gestur, dan ekspresi wajah yang bisa ditafsirkan oleh orang lain. Teori ini menekankan bagaimana kehidupan sosial terbentuk melalui interaksi manusia menggunakan simbol-simbol yang dimaknai. Mead dalam Johnson (1986) juga membahas konsep peran dalam 3 tahap perkembangan konsep diri yaitu tahap Bermain (*play stage*) yang merupakan tahap seorang individu memainkan peranan sosial orang lain seperti seorang anak yang bermain sebagai seorang dokter, tahap Pertandingan (*game stage*) yang merupakan tahap seorang individu mampu menjalankan beberapa peran dan memahami aturan sosial dalam kelompok kecil, dan tahap *Generalize Other* yang merupakan tahap di mana seorang individu dapat menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat luas dan menyadari nilai dan kondisi masyarakat tersebut.

Adapun peran pendamping PKH selaku pelaku pemberdaya dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Peran Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

No.	Peran Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
1	Pendamping PKH memastikan komponen pendidikan yaitu anak sekolah aktif terdaftar di Data Pokok Pendidikan dan melakukan <i>visit</i> saat P2K2 untuk memastikan bahwa anak dari KPM tersebut aktif bersekolah.
2	Pendamping PKH melakukan <i>home visit</i> untuk <i>verval</i> , yakni validasi lapangan langsung untuk mengetahui layak tidaknya penerima KPM.
3	Pendamping PKH melakukan <i>follow up</i> untuk KPM yang bisa diberdayakan untuk diberikan bantuan modal berupa barang agar KPM bisa produktif hingga sampai pada graduasi mandiri.
4	Pendamping PKH melakukan survei kebutuhan KPM, seperti melakukan pendampingan tentang BPJS.

No.	Peran Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
5	Pendamping melakukan <i>home visit</i> untuk komponen kesejahteraan sosial yakni lansia dan orang disabilitas berat untuk memeriksa kebutuhan dan mengajukan kebutuhannya kepada IPSM.
6	Pendamping dalam membantu pemerlu atensi sosial akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pekerja sosial masyarakat atau IPSM.
7	Pendamping melakukan pendampingan dengan ODGJ.
8	Pendamping dalam melakukan pendampingan komponen kesehatan melakukan <i>follow up</i> ke posyandu dan melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan.
9	Pendamping melakukan seleksi untuk anak-anak yang bisa masuk ke program sekolah rakyat.
10	Pendamping dalam proses P2K2 tentunya melakukan penyampaian materi yang disampaikan dengan metode ceramah dengan media berupa <i>banner, flipchart, poster</i> , dll yang bisa disesuaikan dengan kemampuan KPM dalam memahami materi.

Sumber: Data Pimer

Sedangkan peran pendamping PKH dalam Perspektif Interaksi Simbolik George Herbert Mead adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Analisis Peran Pendamping PKH Dalam Perspektif Interaksi Simbolik George Herbert Mead

No.	Analisis Peran Pendamping PKH Dalam Perspektif Interaksi Simbolik George Herbert Mead
1	Pendamping PKH perlu mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan bisa menyesuaikan dengan siapa mereka berhadapan. Pendamping PKH sering kali melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti aparatur desa, kecamatan, dan dengan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Dalam hal ini pendamping PKH menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk berhadapan dengan berbagai pihak tersebut sehingga bisa membangun interaksi yang baik antar kedua pihak.
2	Pendamping PKH perlu memahami kondisi ekonomi KPM dari simbol-simbol yang melekat pada KPM PKH seperti penampilan, kondisi wajah, riasan wajah, kondisi tubuh, dll.
3	Pendamping PKH melakukan edukasi ke agen tarik tunai karena di beberapa wilayah banyak KPM yang memilih untuk melakukan pencairan dana di agen dibanding di ATM karena kurangnya pengetahuan dan adanya risiko kartu ATM tertelan. Kondisi ini mengharuskan pendamping PKH harus melakukan solusi berupa melakukan edukasi ke agen tarik tunai agar pencairan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada pengolektifan.
4	Pendamping PKH bisa disebut telah memasuki tahap <i>Generalize Other</i> , hal ini ditandai dengan perilaku mereka yang terus menyesuaikan diri dengan masyarakat dampungannya yang berbeda-beda kondisi baik kondisi finansial maupun budaya yang melekat pada daerah tersebut. Dalam hal ini pendamping PKH dengan sabar melakukan pendekatan dan memberikan pengertian untuk membangun kesadaran dan mengubah pola pikir KPM agar tidak bergantung dengan bantuan. Namun KPM PKH masih berada di tahap <i>game stage</i> , yang mana hal ini ditunjukkan pada kualitas KPM yang belum bisa mengendalikan diri ketika melakukan pencairan dana, dan belum berpartisipasi aktif dalam P2K2.

Sumber: Data Primer

Pemberdayaan Masyarakat miskin menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena esensi melakukan perubahan pola pikir dan pola perilaku cukup sulit dilakukan. Adapun pelaksanaan PKH di Kecamatan Dramaga Kabupaten mempunyai banyak kendala sebagai berikut.

Tabel 3. Kendala Yang Dihadapi Pendamping PKH Dalam Pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor

No.	Kendala Yang Dihadapi Pendamping PKH Dalam Pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
1	Adanya masalah setelah pencairan dana karena adanya aduan tentang nominal bantuan yang berkurang dan adanya bantuan yang lebih besar.
2	Adanya penyalahgunaan kartu bantuan sosial atau kartu ATM karena kartu ATM kerap kali dipegang oleh oknum lain seperti keluarga yang bersangkutan, seperti anaknya, dan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan KPM yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan.
3	Adanya KPM yang belum melakukan graduasi mandiri sejak 2007 karena selalu memiliki komponen PKH dan kesulitan pendamping PKH untuk mengajak KPM melakukan graduasi mandiri karena sulitnya mengubah pola pikir KPM yang belum memiliki kesadaran untuk mandiri dan merasa nyaman dengan bansos, serta anggapan bahwa bansos adalah bantuan seumur hidup.
4	Adanya KPM yang menempel dan menyimpan PIN di kartu ATM sehingga rawan hilang dan bansos tidak tersalurkan. Maka pendamping kerap kali mengarahkan KPM untuk melakukan perbaikan kartu di bank terkait.
5	Adanya kericuhan saat menjelang pencairan dana karena KPM yang sudah memegang kartu ATM sendiri kerap kali mengecek isi tabungan padahal belum ada informasi yang valid dari pendamping PKH.
6	Adanya pola pikir KPM yang mengandalkan bantuan sehingga kerap kali menanyakan pencairan dana dan hal ini cukup sulit dikendalikan.
7	Adanya KPM yang kerap tidak hadir dalam kegiatan P2K2 karena harus bekerja dan tidak ada anggota keluarga yang mewakili.
8	Adanya gejolak sosial ketika ada beberapa masyarakat yang terus menerima bantuan karena kondisinya tidak kunjung membaik, sehingga hal tersebut menjadikan beberapa masyarakat yang lain iri dan beranggapan bahwa bansos adalah bantuan terus menerus.
9	Pelaksanaan P2K2 kurang efektif karena terbatasnya SDM pendamping PKH dan kerap terhambat karena kondisi geografis yang mana rumah KPM berdekatan sehingga sulit untuk mengumpulkan KPM dalam jumlah yang banyak.
10	Adanya validasi penetapan KPM PKH <i>by system</i> sehingga menyebabkan penyaluran bansos menjadi kacau dan tidak tepat sasaran karena tidak dilakukan survei dan wawancara oleh pendamping PKH.

Sumber: Data Primer

D. Kesimpulan

Peran pendamping PKH dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor adalah sebagai pemberi informasi dan pemberi materi dalam pertemuan kelompok atau P2K2 untuk melakukan intervensi perubahan pola perilaku. Namun peran pendamping PKH dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui P2K2 sebenarnya sangat kompleks karena harus memberikan atensi ke berbagai kelompok pemerlu atensi sosial dan memberikan edukasi ke pihak lain yakni agen tarik tunai agar proses pelaksanaan PKH menjadi lebih maksimal. Sebagai pekerja sosial dan pelaku pemberdaya, pendamping PKH mempunyai banyak tugas di lapangan dan banyak menerima laporan dari berbagai macam masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor adalah adanya masalah terkait pencairan dana, sulitnya memberikan kesadaran kepada penerima bansos agar tidak bergantung dengan bantuan, serta menghadapi gejolak sosial dari masyarakat yang iri terhadap KPM yang terus menerus menerima bansos. Berkaitan dengan hal ini, diharapkan pemerintah memberikan aturan tegas terkait dengan graduasi mandiri dan melakukan pemerataan jumlah SDM pendamping PKH agar bisa menjangkau seluruh KPM PKH yang didampingi.

E. Referensi

Ariwibowo, & Sutiaputri, L. F. (2019). Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) di Komunitas Adat Kampung Kuta, Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Aribowo Lina Favourita

- Sutiaputri. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 01(1), 85–110.
- Depari, R. P. B., Riasih, T., & Rosilawati. (2023). Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 5(1). <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v5i1.676>
- Fatimah, S., Arifin, I. Z., & Sumpena, D. (2019). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Program Keluarga Harapan. *Prophetica : Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 5(1), 63–80. <https://doi.org/10.15575/prophetica.v5i1.1308>
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (R. M. Z. Lawang (ed.)). PT Gramedia.
- Julfani, L., & Putra, I. M. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. 6(1), 42–58. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.270>
- Kamilah, F., Anwar, S., & Dewi, R. (2023). Pengaruh Adanya Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(4), 459–478. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i4.24294>
- Kemensos. (2023). *Inovasi pengawasan berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial pada kementerian sosial*.
- Kusumaningrum, R., Nugroho, F., & Alfrojems. (2020). Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 19(3), 265–275. <https://www.kemensos.go.id/kpm-pkh->
- Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Anak Stunting Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Nurchotimah, A. S., Maftuh, Bunyamin, Malihah, Elly, & Harmawati, Y. (2020). Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 61.
- Nurjanah, Ghozali, B., & Saifuddin, M. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Keluarga Penerima Manfaat Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi Pada Program Keluarga Harapan Kementrian Sosial Di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), 2565–2574.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer* (T. P. YASOGAMA (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Pribowo, & Pratiwi, I. J. (2023). Efektivitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (Pkh) Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 5(1). <https://doi.org/10.31595/biyani.v5i1.759>
- Prihandayani, V. S., & Yulianti, E. (2024). Interaksi Simbolik Hebert Blumer Pengguna Aplikasi Belanja Online Shopee (Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Membangun Konsep Diri dan Perubahan Sikap Pada Ibu-Ibu Pondok Labu). *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(02), 141–153.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 11(1), 1–14.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sulkarnain, S., Arwin, A., & Fitriawaty, F. (2021). Program Keluarga Harapan dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi di Parepare. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1807>
- Susridawati, & Ali, H. (2023). Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 237–248.
- Wijaya, S. (2019). Gerakan Literasi dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Masyarakat Pra Sejahtera. *Sastra Wijaya*, 4(2), 131–145.